

**LAPORAN  
MONITORING DAN EVALUASI  
TRIWULAN I  
TAHUN 2023**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,  
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenanNya maka penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2031 dapat diselesaikan.

Dalam rangka memenuhi amanat Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa setiap Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi kinerja atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah masing-masing, diharapkan Monitoring dan Evaluasi disatukan kerja berjalan semakin baik dan memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja di satuan kerja khususnya DPRKPPLH secara keseluruhan. Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi satuan kerja di DPRKPPLH perlu terus dipantau dan dievaluasi, sekaligus perlu dipastikan agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Laporan Monitoring dan Evaluasi ini disusun berdasarkan hasil paparan dan diskusi pada saat Rapat Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan berkala secara triwulan. Diharapkan Laporan Monitoring dan Evaluasi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke depannya.

Putussibau, 12 April 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,  
Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Kapuas Hulu,



**JANTAU, S.Sos.,M.M**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690201 199010 1 001**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN**  
**PEMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan K.S. Tubun Nomor 108 Telp. (0567) 22790-22791 Fax. (0567) 22790

**PUTUSSIBAU 78711**

**NOTA DINAS**

Dari : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan LH

Kepada Yth : 1. Sekretaris DPRKPPLH  
2. Kepala Bidang Lingkup DPRKPPLH  
3. Pejabat Fungsional Tertentu Lingkup DPRKPPLH

Nomor : 0513/146/DPPLH/SET-A

Tanggal : 5 April 2023

Sifat : Penting

Perihal : Monitoring dan Evaluasi Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan I DPRKPPLH

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan I lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2023, dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu Pada :

Hari/Tanggal : Senin, 10 April 2023

Pukul : 09.00-10.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Bidang Tata Lingkungan

Agenda : Pemaparan masing-masing bidang pelaksanaan realisasi Program dan Kegiatan Triwulan I

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran nya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Kapuas Hulu



**JANTAU, S.Sos. M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690201 199010 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,**  
**PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**  
Jalan K.S. Tubun No 108 Telp.(0567) 22790 - 22791  
Fax. (0567) 22790 E-mail : [klh\\_kapuashulu@yahoo.com](mailto:klh_kapuashulu@yahoo.com)  
**PUTUSSIBAU 78711**

---

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023**  
**PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,**  
**PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**

Pemimpin Rapat : 1. Jantau, S.Sos. M.M (Kepala DPRKPPLH selaku ketua)  
: 2. Indra Kumara, S.Hut., M.Si (Sekretaris DPRKPPLH selaku Koordinator)  
: 3. Arie Budiwan, S.Hut.,M.Si (Plt Kasubbag Program dan Keuangan selaku Pelaksana)

Tempat Rapat : Ruang Rapat Bidang Tata Lingkungan

Hari/Tanggal : Senin, 10 April 2023

Pukul : 09.00 – 10.30 WIB

Peserta Rapat : Kabid, Kasubbag dan Peserta Rapat

**A. Susunan Acara**

No	Uraian	Pembicara	Keterangan
1	Pembukaan	Indra Kumara, S.Hut.,M.Si	Sekretaris DPRKPPLH
2	Pengarahan	Jantau, S.Sos. M.M	Kepala DPRKPPLH
3	Pembahasan	Peserta Rapat	Kabid, Kasubbag dan Peserta Rapat
4	Penutup	Indra Kumara, S.Hut., M.Si	Sekretaris DPRKPPLH

**B. Maksud**

Maksud pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja adalah untuk meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah.

**C. Tujuan**

Adapun tujuannya untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan program/kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan dan kendala yang akan timbul dalam pelaksanaan kegiatan guna untuk dapat diambil tindakan/upaya

pemecahannya. Selain itu, ada beberapa tujuan rangkaian kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja, yaitu untuk meningkatkan kinerja program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran perangkat daerah, meningkatkan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) / melakukan mitigasi terhadap kegagalan pelaksanaan kegiatan, serta upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan membiasakan diri melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala (per triwulan).

#### D. Pokok Pembahasan

Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Triwulan I (Januari s/d Maret) Tahun 2023.

#### E. Hasil Pembahasan

<b>Nama</b>	<b>:</b>	<b>MAWARDI, S.E., M.M.</b>
<b>Jabatan</b>	<b>:</b>	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Hasil Pelaksanaan</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Laporan Persentase Pengembangan Perumahan</b>	
1.1	<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	<i>Laporan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi.</i>	
1.1.1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terkumpulnya dokumen data rumah di lokasi rawan bencana pada 23 Kecamatan
1.1.2	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi.	Terkumpulnya data tingkat kerusakan rumah di desa Nanga Embaloh, Teluk Sindur dan Tekudak

<b>2</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Laporan Persentase Kawasan Pemukiman</b>	
2.1	<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</i>	<i>Laporan Pelaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</i>	
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Tersusunnya readiness criteria kegiatan pembangunan rumah betang urang unsa dan waterfront siluk
2.2	<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	<i>Laporan Pelaksanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	
2.2.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Tersusunnya dokumen survei desa Sekulat
2.2.2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Tersedianya data untuk penyusunan KAK RP2KPKPK
2.3	<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	<i>Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	
2.3.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Terkumpulnya data awal rumah tidak layak huni pada kawasan kumuh
<b>3</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Laporan Persentase Perumahan dan</b>	

		<b>Kawasan Permukiman Kumuh</b>	
3.1	<i>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Laporan Pelaksanaan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kumuh pada daerah</i>	
3.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Terkumpulnya data awal rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh

<b>Nama</b>	<b>:</b>	<b>M. SUDIRMAN, S.P., M.M.</b>
<b>Jabatan</b>	<b>:</b>	Kepala Bidang Pertanahan

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Hasil Pelaksanaan</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>	<b>Laporan Persentase Pengelolaan Izin Lokasi</b>	
1.1	<i>Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Laporan Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Laporan Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	
2.2	<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Laporan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 Daerah Kab / Kota</i>	

2.2.1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.2.2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>Laporan Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.</b>	
3.1	<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Laporan Pelaksanaan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	
3.1.1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	
3.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
<b>4</b>	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>Laporan Persentase Redistribusi Tanah Serta Gati Kerugian Program Tanah Kelebihan</b>	

		<b>Maksimum dan Taah Absentee.</b>	
4.1	<i>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1</i>	<i>Laporan Penetapan Subjek &amp; Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam Satu Daerah Kab / Kota</i>	
4.1.1	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
4.1.2	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>	<b>Laporan Persentase Penetapan Tanah Ulayat</b>	
5.1	<i>Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Laporan Pelaksanaan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
5.1.3	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	

<b>6</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Laporan Persentase Penatagunaan Tanah</b>	
6.1	<i>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Laporan Pelaksanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	
6.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	

**Nama** : **INDRA KUMARA, S.Hut., M.Hut.**

**Jabatan** : **Sekretaris DPRKPPLH**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Hasil Pelaksanaan</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (Sekretariat)</b>	<b>Predikat SAKIP</b>	

**Nama** : **Arie Budiwan, S.Hut., M.Si**

**Jabatan** : **Plt. Kasubbag Program dan Keuangan**

<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Hasil Pelaksanaan</b>
1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Laporan pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sudah tersusunnya Dokumen DPA dan RKA
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA_SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pelaksanaan akan dilaksanakan pada akhir triwulan ke 4

1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen LAKIP dan LKPJ tahun 2022 sudah di laksanakan
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi Triwulan 1 sedang di laksanakan
2.1	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
2.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sudah dilaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan ASN
2.1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sudah dilaksanakan pembuatan beberapa dokumen yaitu: 1. SK PA/KPA/Bendahara Pengeluaran 2. SK PPTK/PPKom 3. SK Pembantu Bendahara 4. SK Pejabat Penatausahaan Keuangan 5. Dokumen SPJ Bulanan 6. Dokumen SPT dan SPPD
2.1.3	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

<b>Nama</b>	<b>:</b>	<b>JONI ORBA, S.I.P.</b>
<b>Jabatan</b>	<b>:</b>	<b>Kasubbag Umum dan Aparatur</b>

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Pelaksanaan
1.1	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
1.1.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
1.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
1.1.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
1.1.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
1.1.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
1.1.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2.1	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
2.1.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
3.1	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>Laporan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	
3.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
4.1	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
4.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	
4.1.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	

<b>Nama</b>	<b>:</b>	<b>IMAM BUHARI, S.T.</b>
<b>Jabatan</b>	<b>:</b>	Kepala Bidang Tata Lingkungan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Pelaksanaan
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Laporan Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	
1.1	<i>Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/KOTA</i>	<i>Laporan pelaksanaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/KOTA</i>	
1.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	
1.1.2	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	

<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Laporan Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).</b>	
2.1	<i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH 'diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab./Kota</i>	
2.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	3 rekomendasi - PT. Equator Sumber Rezeki - PT. Ceram Agrotama Energi - TPA Kalis
2.1.2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Verifikasi lapangan terkait kelengkapan administrasi pengajuan perizinan bidang LH oleh RS. Bergerak badau 2. Pengawasan dan monitoring kepatuhan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit PT. Buana Tunas Sejahtera Badau 3. Verifikasi lapangan terkait kelengkapan administrasi pengajuan perizinan bidang LH oleh RSUD Semitau

			<p>4. Pengawasan dan monitoring kepatuhan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit PT. Paramitra Internusa Pratama Semitau</p> <p>5. Pengawasan dan monitoring kepatuhan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan RS. Bergerak badau</p> <p>6. Pengawasan dan monitoring kepatuhan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit PT. Kapuasindo Palm Industri Empanang</p>
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>Laporan Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH.</b>	
3.1	<i>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</i>	<i>Laporan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan HAK MHA yang terkait dengan PPLH</i>	
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan	Verifikasi lapangan 3 dokumen permohonan MHA. Dengan hasil pelaksanaan berupa

	Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	berita acara verifikasi, dokumentasi dan daftar hadir. <ul style="list-style-type: none"> <li>• MHA Menua Tebelian</li> <li>• MHA Menua Ngaung Keruh</li> <li>• MHA Menua Engkerejai</li> </ul>
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Laporan Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.</b>	
4.1	<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</i>	<i>Laporan pelaksanaan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota</i>	
4.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti / Ditangani	Tidak ada pengaduan

<b>Nama</b>	<b>: SULASTRI, S.S.T</b>
<b>Jabatan</b>	<b>: Kepala Bidang Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup</b>

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Hasil Pelaksanaan</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Laporan Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.</b>	
1.1	<i>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	<i>Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	<i>Laporan Aktivitas Triwulan I (Rangkuman Kegiatan selama bulan Januari-April Tahun 2023)</i>

1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi & Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 BA Pengawasan Perusahaan dan Laporan Hasil Uji
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Laporan Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	
2.1	<i>Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/KOTA</i>	<i>Laporan pelaksanaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/KOTA</i>	
2.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	
2.1.2	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Kegiatan Penanaman Pohon merupakan pembagian bibit pohon ke kecamatan, kesekolahan, serta masyarakat untuk menunjang kegiatan konservasi, sehingga memberi manfaat keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Adapun jumlah Taman yang dipelihara Rutin sebanyak 18 Lokasi Taman, pemeliharaan penebasan jalan dan pembersihan drainase dalam 1 Dokumen
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Laporan Persentase Pengelolaan Persampahan</b>	
3.1	<i>Kegiatan Pengelolaan Sampah</i>	<i>Laporan Pengelolaan Sampah</i>	
3.1.1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan	

		Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	
3.1.2	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab.Kota (DAK-DAU)	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dikumpulkan dan diangkut ke TPA 1.188 Ton (39.6 ton/bln x 3 bln = 1.188 Ton)

F. Penutup

- o Penutupan oleh Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Bapak **Indra Kumara, S.Hut., M.Si.**

<p>Mengetahui, Plt. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu</p>  <p><b><u>Arie Budiwan, S.Hut., M.Hut</u></b> Pembina NIP. 19800517 200604 1 011</p>	<p>Menyetujui, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu</p>  <p><b><u>Jantau, S.Sos., M.M</u></b> Pembina Utama Muda NIP. 19690201 199010 1 001</p>
--	--

## ABSENSI RAPAT



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN, PERTANAHAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan K.S. Tubun No 108 Telp. (0567) 22790 - 22791 Fax. (0567) 22790  
E-mail : kfh\_kapuashulu@yahoo.com

NAMA KEGIATAN  
HARI/TANGGAL  
PUKUL  
TEMPAT

: Menu Program dan KEGIATAN I  
: Senin, 10 April 2023  
: 09.00 - 10.30 WIB  
: Ruang Rapat Ruang Tata Lingkungan

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Indra Kumara	Sebidan	
2	ABDUL BASAR	Staf	
3	Kusnianti, SST	Kejeng pabel	
4	Pontis Ashta,	Deputi TBP	
5	Eduardus Elkes,		
6	Sulkarman	Staf	
7	Kadarisno	Analisis LH	
8	T. Simanungkalit	Pengarah LH	
9	Azmi Immanuel	Staf	
10	Sulastri	Kabid p2LH	
11	Imam Buhari	Kabid Tata Lingkungan	
12	Febrio Bayu W	JP TBP.	
13	Ade Kernal N	Staf	

## DOKUMENTASI RAPAT



